
ANALISIS PERBANDINGAN ETIKA PEMERINTAHAN DI NEGARA-NEGARA DENGAN TINGKAT KORUPSI RENDAH: PEMBELAJARAN UNTUK INDONESIA

Oleh

Anni Mujahida Kamal^{1*}, Juanda Nawawi², Suhardiman Syamsu³

^{1,2,3}Department of Government Science, Faculty of Social and Political Science, Hasanuddin University, Makassar City, Indonesia

Email: ^{1*}andiannykamal@gmail.com, ²juandanawawi1808@gmail.com,

³suhardiman@unhas.ac.id

Article History:

Received: 28-12-2024

Revised: 07-01-2025

Accepted: 21-01-2025

Keywords:

Perbandingan, Etika

Pemerintahan, Pembelajaran

Untuk Indonesia

Abstract: Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis perbedaan dalam etika pemerintahan antara negara-negara yang memiliki tingkat korupsi rendah dan Indonesia, serta untuk menemukan praktik-praktik unggulan yang dapat diadopsi oleh Indonesia dalam rangka memperbaiki etika pemerintahan dan menekan angka korupsi. Perbedaan antara etika pemerintahan di negara-negara dengan korupsi rendah dan kondisi di Indonesia, serta berbagai hambatan yang dihadapi Indonesia dalam mengimplementasikan etika pemerintahan yang baik. Penelitian ini juga menekankan pentingnya transparansi, akuntabilitas, dan integritas dalam pengelolaan pemerintahan.

Metode penelitian yang digunakan yaitu metode kualitatif melalui kajian literatur untuk mengumpulkan dan menganalisis informasi tentang etika pemerintahan di negara-negara dengan korupsi rendah. Sumber yang digunakan meliputi artikel, buku, dan dokumen kebijakan. Proses mencakup pemilihan literatur berdasarkan kriteria tertentu dan evaluasi kualitas sumber. Analisis dilakukan secara tematik untuk mengidentifikasi pola dan tema utama, serta membandingkan praktik etika pemerintahan dan pengaruh budaya, sosial, dan politik terhadap pencegahan korupsi. Hasil kajian diharapkan memberikan wawasan bagi Indonesia dalam meningkatkan etika pemerintahan dan mengurangi korupsi.

Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa negara-negara dengan tingkat korupsi rendah secara konsisten menerapkan prinsip-prinsip etika pemerintahan, termasuk keterlibatan aktif masyarakat dan sistem pengawasan yang efisien. Sebaliknya, Indonesia masih menghadapi sejumlah tantangan dalam penerapan etika pemerintahan, seperti minimnya transparansi dan akuntabilitas. Penelitian ini merekomendasikan serangkaian langkah strategis untuk memperbaiki etika pemerintahan di Indonesia, mencakup penguatan regulasi serta peningkatan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya etika dalam konteks pemerintahan.

PENDAHULUAN

Perbandingan etika pemerintahan di negara-negara dengan tingkat korupsi yang rendah memiliki relevansi yang tinggi dalam konteks Indonesia, di mana korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) masih menjadi masalah serius dalam pengelolaan pemerintahan. Praktik korupsi tidak hanya merusak reputasi dan integritas lembaga publik, tetapi juga menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Berdasarkan laporan *dari United Nations Development Programme (UNDP)*, prinsip-prinsip good governance yang meliputi transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat merupakan elemen penting untuk mencegah terjadinya korupsi serta meningkatkan kualitas layanan publik. Oleh karena itu, sangat penting untuk mengeksplorasi bagaimana negara-negara dengan tingkat korupsi rendah berhasil menerapkan etika pemerintahan yang efektif dan berkelanjutan.

Secara global, ada banyak contoh negara yang berhasil menekan angka korupsi melalui penerapan etika pemerintahan yang solid. Negara-negara seperti Denmark, Selandia Baru, dan Finlandia sering kali muncul sebagai pemimpin dalam Indeks Persepsi Korupsi (CPI) yang dirilis oleh *Transparency International*. Negara-negara ini menunjukkan bahwa penerapan prinsip-prinsip etika dalam administrasi publik memiliki dampak signifikan dalam mengurangi praktik korupsi. Dalam hal ini, perbandingan terhadap etika pemerintahan di negara-negara tersebut dapat memberikan panduan berharga bagi Indonesia untuk memperbaiki sistem tata kelola dan mengatasi masalah korupsi.

Etika dalam pemerintahan sangat penting tidak hanya dari segi kepatuhan terhadap hukum, tetapi juga berkaitan dengan integritas individu yang menduduki jabatan publik. Integritas menjadi landasan bagi setiap keputusan dan tindakan yang diambil oleh para pemimpin pemerintah. Banyak penelitian menunjukkan bahwa rendahnya tingkat integritas sering kali berkaitan erat dengan tingginya angka korupsi. Oleh karena itu, perlu adanya penguatan nilai-nilai etika di kalangan pejabat publik secara menyeluruh untuk membangun budaya kerja yang bersih dan transparan.

Di Indonesia, tantangan terbesar adalah melakukan perubahan pada pola pikir dan budaya birokrasi yang telah mengakar kuat. Banyak pejabat publik yang masih lebih mengutamakan kepentingan pribadi dibandingkan dengan kepentingan masyarakat luas. Penguatan etika harus menjadi fokus utama dalam reformasi birokrasi. Diperlukan pendekatan sistemik agar nilai-nilai etika tidak hanya menjadi jargon semata, tetapi benar-benar diterapkan dalam setiap aspek pemerintahan.

Oleh sebab itu, timbul keinginan penulis untuk menganalisa etika pemerintahan yang dituangkan dalam judul "Analisis perbandingan etika pemerintahan dengan tingkat korupsi rendah: Pembelajaran untuk Indonesia". Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana penerapan etika pemerintahan di negara-negara dengan tingkat korupsi rendah dapat memberikan pelajaran berharga bagi Indonesia dalam usaha memberantas korupsi? Pertanyaan ini akan dijawab melalui studi komparatif mengenai kebijakan dan praktik etika di negara-negara tersebut serta analisis terhadap konteks lokal di Indonesia.

Dengan mempelajari praktik terbaik dari negara-negara lain, Indonesia dapat merancang strategi yang lebih efektif untuk memperkuat etika pemerintahan. Ini mencakup peningkatan regulasi, penegakan hukum yang lebih tegas, serta peningkatan pendidikan dan pelatihan mengenai etika bagi para pejabat publik. Melalui langkah-langkah ini, harapannya

adalah Indonesia dapat bergerak menuju sistem pemerintahan yang lebih baik dan bebas dari praktik KKN.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui sebuah kajian literatur yang terstruktur dengan baik. Tujuan dari pendekatan ini adalah untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menyintesis informasi dari beragam sumber yang relevan terkait dengan etika pemerintahan di negara-negara yang memiliki tingkat korupsi yang rendah. Sumber-sumber tersebut meliputi artikel akademis, buku, laporan riset, serta dokumen kebijakan yang membahas praktik etika dalam pemerintahan dan faktor-faktor yang berkontribusi terhadap rendahnya angka korupsi. Proses ini akan mencakup pemilihan literatur yang sesuai berdasarkan kriteria inklusi dan eksklusi yang telah ditentukan, serta evaluasi kualitas dan relevansi setiap sumber untuk memastikan keabsahan hasil penelitian. Kemudian, analisis dilakukan dengan menerapkan pendekatan tematik guna mengidentifikasi pola-pola dan tema-tema utama yang muncul dari literatur yang telah dikaji. Peneliti akan melakukan perbandingan antara berbagai praktik etika pemerintahan di negara-negara tersebut dan menyelidiki bagaimana aspek-aspek budaya, sosial, dan politik dapat memengaruhi efektivitas etika dalam upaya pencegahan korupsi. Diharapkan bahwa hasil dari kajian ini dapat memberikan wawasan penting bagi Indonesia dalam merumuskan strategi untuk meningkatkan etika pemerintahan serta mengurangi tingkat korupsi, sekaligus menjadi referensi bagi penelitian lebih lanjut di bidang ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Negara-Negara yang Tingkat Korupsi Rendah

a. Denmark

Denmark menonjol sebagai salah satu negara yang paling berhasil dalam memberantas korupsi, berkat sistem pemerintahan yang sangat transparan dan berintegritas tinggi. Etika pemerintahan di Denmark berdiri kokoh di atas dasar hukum yang ketat dan pengawasan publik yang aktif. Negara ini secara konsisten berada di puncak Indeks Persepsi Korupsi (IPK), mencerminkan tingginya kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah. Dengan skor IPK yang stabil di angka 90 atau lebih, Denmark menunjukkan komitmen kuat untuk menjaga integritas pemerintahan. Kebijakan anti-korupsinya yang efektif menciptakan budaya di mana korupsi dianggap tidak dapat diterima dalam masyarakat.

Keterbukaan informasi adalah salah satu elemen kunci dalam keberhasilan Denmark melawan korupsi. Melalui "*Public Records Act*", setiap warga negara memiliki hak untuk mengakses informasi pemerintah, yang memungkinkan kontrol publik terhadap administrasi. Portal keterbukaan data seperti www.digitaliser.dk memudahkan masyarakat untuk mengakses informasi terkait kebijakan dan pengeluaran pemerintah, meningkatkan transparansi, dan memungkinkan partisipasi aktif dalam proses demokrasi. Selain itu, anggota parlemen dan pejabat publik diwajibkan untuk melaporkan pendapatan dan pengeluaran mereka secara rinci, mengurangi potensi penyalahgunaan wewenang.

Sistem peradilan di Denmark juga berperan besar dalam menjaga rendahnya tingkat korupsi. Dengan mekanisme hukum yang efisien dan adil, setiap individu diperlakukan sama di hadapan hukum, tanpa memandang status sosial atau jabatan. Tingkat kepercayaan publik

terhadap kepolisian Denmark tinggi, berkat pengawasan internal yang ketat memastikan bahwa tindakan penyelewengan dapat diinvestigasi dan dihukum tegas. Lembaga seperti *"The Parliamentary Ombudsman"* memainkan peran penting dalam menampung aspirasi masyarakat dan melakukan investigasi atas inisiatif sendiri, sehingga menciptakan saluran bagi publik untuk menyampaikan keluhan dan mendapatkan keadilan.

b. Singapura

Singapura merupakan salah satu negara dengan tingkat korupsi yang sangat rendah, berkat penerapan etika pemerintahan yang kokoh dan prinsip-prinsip tata kelola yang baik. Dalam konteks ini, etika pemerintahan di Singapura tidak hanya tergambar dalam kebijakan formal, tetapi juga dalam budaya dan nilai-nilai yang dipegang oleh masyarakat serta pemerintah. Negara ini mengadopsi sistem meritokrasi dalam birokrasi, yang berarti bahwa rekrutmen dan promosi pegawai negeri didasarkan pada kompetensi dan kinerja, bukan pada hubungan pribadi atau nepotisme. Ini menciptakan lingkungan kerja yang profesional dan mendorong para pegawai untuk bertindak dengan integritas. Selain itu, Singapura juga menerapkan kebijakan nol toleransi terhadap korupsi, di mana setiap pelanggaran etika ditindak tegas, menciptakan efek jera bagi para pelaku.

Salah satu mekanisme utama dalam menjaga etika pemerintahan di Singapura adalah keberadaan lembaga independen yang bertugas memberantas korupsi, yaitu Biro Investigasi Praktik Korupsi (CPIB). CPIB bertanggung jawab untuk menyelidiki dan mencegah praktik korupsi di sektor publik maupun swasta. Lembaga ini beroperasi tanpa tekanan politik dan memiliki wewenang untuk melakukan penyelidikan menyeluruh terhadap dugaan korupsi. Dengan dukungan anggaran yang memadai dan staf yang terlatih, CPIB mampu menjalankan tugasnya secara efektif. Keberadaan lembaga ini menunjukkan komitmen pemerintah Singapura untuk menciptakan sistem pemerintahan yang bersih dan transparan. Selain itu, CPIB juga melakukan penyaringan terhadap calon pegawai negeri untuk memastikan hanya individu dengan karakter dan integritas yang baik yang dapat menduduki posisi penting dalam pemerintahan.

Singapura juga menggunakan teknologi informasi melalui sistem pemerintahan elektronik (e-government) untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pelayanan publik. Dengan memanfaatkan teknologi, pemerintah dapat menyediakan layanan secara daring, sehingga mengurangi peluang terjadinya praktik korupsi. Sistem ini memungkinkan warga negara untuk mengakses informasi terkait pelayanan publik dengan mudah, serta memberikan umpan balik langsung kepada pemerintah. Selain itu, penggunaan teknologi dalam administrasi publik membantu mempercepat proses pengambilan keputusan dan meningkatkan efisiensi birokrasi. Dengan demikian, e-government menjadi salah satu alat penting dalam upaya pencegahan korupsi di Singapura.

c. Swedia

Swedia memiliki reputasi unggul dalam hal pemerintahan yang jujur dan transparan. Sejak abad ke-19, negara ini telah berupaya menciptakan sistem pemerintahan yang demokratis dan inklusif. Komitmen mereka terhadap transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan negara menjadi salah satu faktornya. Pemerintah Swedia berusaha memberikan akses informasi yang luas kepada masyarakat, sehingga warga dapat dengan mudah memantau aktivitas pemerintah dan memastikan bahwa keputusan dibuat secara adil dan terbuka.

Ciri khas etika pemerintahan di Swedia adalah partisipasi aktif masyarakat. Warga Swedia dianggap sebagai aktor penting dalam proses pengambilan keputusan. Melalui platform online resmi, masyarakat dapat menyampaikan opini dan pertanyaan langsung kepada pejabat publik. Selain itu, undang-undang privasi data yang ketat memastikan bahwa informasi sensitif tidak diungkapkan tanpa izin yang sah. Ini menciptakan lingkungan yang nyaman bagi masyarakat untuk terlibat dalam pemerintahan, meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah.

Untuk menjaga pemerintahan tetap bersih, Swedia memiliki struktur anti-korupsi yang kuat. Badan investigasi independen seperti Unit Investigasi Federal (Åklagaren) bertugas mengidentifikasi dan menindak kasus korupsi. Selain itu, Undang-Undang Anti Korupsi Swedia memberikan sanksi tegas bagi pejabat publik yang terlibat dalam praktik korupsi. Hal ini menciptakan lingkungan kerja yang menakutkan bagi mereka yang melakukan tindakan ilegal, sehingga mengurangi potensi korupsi. Dengan demikian, Swedia menjadi contoh ideal bagi banyak negara lain dalam menerapkan etika pemerintahan yang bersih dan transparan, serta kemampuan beradaptasi dalam menghadapi tantangan global.

d. Norwegia

Norwegia merupakan salah satu negara yang dikenal memiliki tingkat korupsi yang sangat rendah, berkat sistem pemerintahan yang kuat dan etika administrasi publik yang tinggi. Negara ini menerapkan prinsip-prinsip integritas dalam setiap aspek pemerintahan, mulai dari pengambilan keputusan hingga pelaksanaan kebijakan. Salah satu faktor kunci yang mendukung rendahnya tingkat korupsi di Norwegia adalah adanya kebijakan anti-korupsi yang ketat. Pemerintah Norwegia telah mengembangkan berbagai regulasi dan mekanisme untuk mencegah praktik korupsi di kalangan pejabat publik. Kebijakan ini mencakup transparansi dalam pengelolaan anggaran negara, pengawasan yang ketat terhadap penggunaan dana publik, serta sanksi yang tegas bagi pelanggar. Dengan demikian, masyarakat memiliki kepercayaan yang tinggi terhadap pemerintah, yang pada gilirannya memperkuat legitimasi institusi publik.

Pelatihan etika bagi pejabat publik juga menjadi salah satu pilar penting dalam menjaga integritas pemerintah di Norwegia. Program-program pelatihan ini dirancang untuk meningkatkan kesadaran etis di kalangan pegawai negeri dan memastikan bahwa mereka memahami tanggung jawab mereka sebagai pelayan publik. Melalui pelatihan ini, pejabat publik diajarkan tentang pentingnya transparansi, akuntabilitas, dan tanggung jawab dalam menjalankan tugas mereka. Selain itu, Norwegia memiliki lembaga pengawasan independen yang berfungsi untuk memantau tindakan pemerintah dan memberikan rekomendasi perbaikan jika diperlukan. Lembaga ini tidak hanya bertugas mengawasi tetapi juga memberikan pendidikan kepada masyarakat mengenai hak-hak mereka dan cara melaporkan dugaan pelanggaran.

Sistem demokrasi di Norwegia juga berkontribusi pada rendahnya tingkat korupsi. Sebagai negara monarki konstitusional dengan sistem pemerintahan parlementer, kekuasaan politik di Norwegia terdistribusi secara merata antara berbagai lembaga pemerintah. Hal ini menciptakan mekanisme checks and balances yang efektif, di mana setiap cabang pemerintahan dapat saling mengawasi dan mengontrol satu sama lain. Partisipasi masyarakat dalam proses politik sangat dihargai, dan warga negara diberikan akses yang luas terhadap informasi mengenai kebijakan pemerintah. Dengan adanya keterbukaan informasi

ini, masyarakat dapat lebih aktif terlibat dalam pengawasan terhadap tindakan pemerintah, sehingga mengurangi kemungkinan terjadinya korupsi.

Di samping itu, budaya masyarakat Norwegia juga memainkan peran penting dalam menegakkan etika pemerintahan. Masyarakat Norwegia umumnya memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi terhadap institusi publik dan percaya bahwa pejabat publik harus bertindak dengan integritas. Nilai-nilai sosial seperti egalitarianisme dan solidaritas sangat dijunjung tinggi, menciptakan lingkungan di mana praktik korupsi dianggap tidak dapat diterima. Pendidikan yang baik dan akses informasi yang luas juga membantu membentuk sikap kritis masyarakat terhadap tindakan pemerintah. Dengan demikian, kombinasi antara kebijakan pemerintah yang kuat, pelatihan etika bagi pejabat publik, sistem demokrasi yang efektif, serta budaya masyarakat yang mendukung integritas telah menjadikan Norwegia sebagai contoh negara dengan tingkat korupsi rendah dan etika pemerintahan yang tinggi.

e. Finlandia

Finlandia dikenal sebagai salah satu negara yang memiliki sistem hukum yang tangguh serta budaya transparansi yang tinggi. Di dalam lingkup etika pemerintahan, Finlandia menjadikan prinsip-prinsip hukum sebagai fondasi untuk setiap tindakan publik. Konstitusi Finlandia mensyaratkan bahwa segala bentuk penggunaan kekuasaan publik harus didasarkan pada hukum, dan setiap orang yang merasa dirugikan oleh keputusan administrasi memiliki hak untuk mengajukan gugatan. Hal ini menciptakan sistem kontrol yang efektif terhadap tindakan pemerintah, di mana Mahkamah Agung Administratif Finlandia (SACF) memainkan peran penting dalam mengawasi pelaksanaan hukum dan memberikan opini terkait rancangan peraturan. Dengan adanya lembaga peradilan yang independen dan kompeten, masyarakat dapat merasa lebih aman dan terlindungi dari penyalahgunaan kekuasaan, yang pada gilirannya berkontribusi pada rendahnya tingkat korupsi di negara ini.

Salah satu faktor utama yang mendukung etika pemerintahan di Finlandia adalah keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Pemerintah Finlandia menerapkan prinsip keterbukaan, di mana semua keputusan harus diumumkan kepada publik dan dokumen-dokumen pemerintah dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat. Hal ini tidak hanya meningkatkan transparansi tetapi juga mendorong partisipasi aktif dari warga negara dalam mengawasi tindakan pemerintah. Dengan melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, pemerintah Finlandia mengurangi peluang terjadinya korupsi karena keputusan yang diambil menjadi lebih objektif dan berdasarkan kepentingan umum. Keterlibatan ini juga menciptakan rasa memiliki di kalangan masyarakat terhadap kebijakan yang dihasilkan, sehingga mereka lebih cenderung untuk mendukung dan memperjuangkan keadilan serta integritas dalam pemerintahan.

Selain itu, pendidikan tinggi di Finlandia juga memberikan kontribusi yang signifikan terhadap etika pemerintahan yang baik. Sistem pendidikan yang berkualitas tinggi membekali warga negara dengan pengetahuan dan pemahaman tentang hak-hak mereka serta cara untuk melindunginya. Masyarakat yang terdidik cenderung lebih kritis terhadap kebijakan pemerintah dan mampu mengidentifikasi praktik-praktik korupsi. Pendidikan juga memainkan peran penting dalam membentuk budaya anti-korupsi sejak dini, sehingga generasi mendatang akan terus melanjutkan tradisi pemerintahan yang bersih dan transparan. Dengan demikian, Finlandia menunjukkan bahwa investasi dalam pendidikan

tidak hanya berdampak pada pembangunan ekonomi tetapi juga pada pembentukan tata kelola pemerintahan yang baik.

Keberhasilan Finlandia dalam menjaga etika pemerintahan yang tinggi juga didukung oleh struktur administrasi yang efisien dan minimnya birokrasi. Pemerintah Finlandia mengadopsi prinsip objektivitas, kesetaraan, dan proporsionalitas dalam setiap tindakan administratifnya. Dengan sedikit tingkatan birokrasi, proses pengambilan keputusan menjadi lebih cepat dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Selain itu, lembaga-lembaga pengawas independen memiliki peran penting dalam memastikan akuntabilitas pemerintah. Semua faktor ini berkontribusi pada terciptanya lingkungan di mana korupsi hampir tidak ada, sehingga pelayanan publik dapat berjalan dengan baik dan memberikan manfaat maksimal bagi seluruh warga negara

2. Pembelajaran untuk Indonesia

a. Penguatan Hukum

Memperkuat hukum adalah langkah yang sangat penting untuk membangun etika pemerintahan yang solid. Ini melibatkan penerapan aturan yang lebih ketat terkait etika bagi para pejabat publik serta penegakan sanksi yang tegas bagi mereka yang melanggar. Di sejumlah negara dengan tingkat korupsi yang rendah, seperti Singapura dan Denmark, penegakan hukum yang konsisten dan transparan menjadi faktor kunci dalam menjaga integritas pemerintahan. Dengan adanya regulasi yang jelas, setiap tindakan penyalahgunaan kekuasaan dapat dikenali dan dihukum secara adil.

Kepentingan penguatan hukum tidak hanya terletak pada pembuatan undang-undang, tetapi juga pada bagaimana undang-undang tersebut diimplementasikan. Di Indonesia, sering kali terdapat kesenjangan antara hukum yang berlaku dan praktik di lapangan. Oleh karena itu, reformasi dalam sistem peradilan sangat diperlukan untuk memastikan bahwa setiap pelanggaran etika ditindaklanjuti dengan serius. Ini mencakup peningkatan kapasitas lembaga penegak hukum seperti KPK dan Ombudsman agar lebih efektif dalam menjalankan tugas mereka.

Selain itu, penguatan hukum juga memerlukan dukungan dari masyarakat. Edukasi publik mengenai hak-hak mereka serta cara melaporkan pelanggaran etika menjadi sangat krusial. Dengan meningkatnya kesadaran masyarakat, akan ada tekanan lebih besar terhadap pemerintah untuk bertindak sesuai dengan norma-norma etika yang telah ditetapkan. Hal ini dapat menciptakan budaya di mana pelanggaran etika tidak lagi ditoleransi.

Akhirnya, penguatan hukum harus disertai dengan evaluasi berkala terhadap efektivitas regulasi yang ada. Pemerintah perlu melakukan audit dan review terhadap kebijakan yang diterapkan untuk memastikan bahwa mereka tetap relevan dan efektif dalam mencegah korupsi serta meningkatkan etika pemerintahan.

b. Transparansi dan Akuntabilitas

Transparansi dan akuntabilitas merupakan dua pilar utama dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Meningkatkan akses informasi bagi publik memungkinkan masyarakat untuk mengawasi tindakan pemerintah secara langsung. Negara-negara dengan tingkat korupsi rendah sering kali memiliki sistem transparansi yang kuat, di mana informasi mengenai anggaran, pengeluaran, dan keputusan kebijakan dapat diakses oleh publik tanpa hambatan.

Di Indonesia, meskipun terdapat Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, implementasinya masih sering kali kurang optimal. Banyak informasi penting yang tidak tersedia atau sulit diakses oleh masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah perlu berkomitmen untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas informasi yang disediakan kepada publik. Ini termasuk penggunaan teknologi informasi untuk menyebarkan data secara real-time.

Akuntabilitas juga harus ditegakkan melalui mekanisme pengawasan yang efektif. Lembaga-lembaga seperti Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) perlu diberikan wewenang lebih besar untuk melakukan audit independen terhadap penggunaan anggaran pemerintah. Dengan adanya audit yang transparan, masyarakat dapat mengetahui bagaimana dana publik digunakan dan apakah terdapat penyalahgunaan wewenang.

Terakhir, penting bagi pemerintah untuk membangun saluran komunikasi yang efektif dengan masyarakat. Melalui forum-forum diskusi atau konsultasi publik, masyarakat dapat memberikan masukan mengenai kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Dengan cara ini, transparansi tidak hanya menjadi kewajiban pemerintah, tetapi juga menjadi bagian dari partisipasi aktif masyarakat dalam proses pemerintahan.

c. Pendidikan Etika

Pendidikan etika bagi pejabat publik adalah langkah penting dalam membangun integritas dalam pemerintahan. Dengan memberikan pelatihan etika secara berkala, pejabat publik akan lebih memahami pentingnya nilai-nilai moral dalam menjalankan tugas mereka. Negara-negara dengan tingkat korupsi rendah sering memiliki program pendidikan etika yang terintegrasi dalam sistem pendidikan formal bagi pegawai negeri.

Di Indonesia, pendidikan etika seharusnya menjadi bagian dari kurikulum pelatihan bagi calon pegawai negeri sipil (PNS). Materi pendidikan ini tidak hanya mencakup teori-teori dasar tentang etika pemerintahan tetapi juga studi kasus nyata mengenai pelanggaran etika dan dampaknya terhadap masyarakat. Dengan cara ini, para pegawai akan lebih siap menghadapi tantangan moral saat menjalankan tugas mereka.

Selain itu, pendidikan etika juga harus melibatkan tokoh-tokoh masyarakat dan ahli di bidangnya untuk memberikan perspektif yang lebih luas mengenai pentingnya integritas dalam pelayanan publik. Diskusi interaktif dapat membantu memperdalam pemahaman para pegawai tentang konsekuensi dari tindakan mereka serta membangun komitmen untuk bertindak sesuai dengan nilai-nilai etika.

Terakhir, evaluasi terhadap program pendidikan etika perlu dilakukan secara berkala untuk memastikan efektivitasnya. Pemerintah harus mengukur dampak dari pelatihan ini terhadap perilaku pejabat publik serta mengadaptasi materi ajar sesuai dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat.

d. Partisipasi Publik

Mendorong partisipasi publik dalam proses pemerintahan adalah langkah penting untuk menciptakan sistem yang lebih responsif dan bertanggung jawab. Ketika masyarakat terlibat aktif dalam pengambilan keputusan, mereka merasa memiliki andil dalam kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Negara-negara dengan tingkat korupsi rendah sering kali memiliki mekanisme partisipasi publik yang kuat melalui forum-forum konsultasi atau referendum.

Di Indonesia, partisipasi publik masih sering terhambat oleh kurangnya akses informasi dan saluran komunikasi antara pemerintah dan masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah perlu menciptakan platform-platform yang memungkinkan masyarakat untuk

menyampaikan pendapat mereka mengenai kebijakan publik secara langsung. Ini bisa dilakukan melalui aplikasi digital atau forum tatap muka yang rutin diadakan.

Partisipasi publik juga harus didorong melalui pendidikan politik bagi masyarakat. Dengan meningkatkan pemahaman masyarakat tentang hak-hak mereka dan cara berpartisipasi dalam proses demokratis, akan ada peningkatan kesadaran akan pentingnya keterlibatan mereka dalam pemerintahan. Pendidikan ini dapat dilakukan melalui seminar-seminar atau program-program komunitas.

Akhirnya, penting bagi pemerintah untuk menghargai masukan dari masyarakat dengan menindaklanjuti hasil konsultasi tersebut dalam kebijakan yang diambil. Ketidakpedulian terhadap suara rakyat dapat menyebabkan apatisme dan menurunnya kepercayaan terhadap pemerintah. Dengan demikian, partisipasi publik bukan hanya sekadar formalitas tetapi merupakan bagian integral dari tata kelola pemerintahan yang baik.

e. Reformasi Birokrasi

Reformasi birokrasi diperlukan untuk menciptakan sistem pemerintahan yang lebih efisien dan transparan. Birokrasi yang baik harus mampu memberikan pelayanan publik secara optimal tanpa adanya praktik korupsi atau nepotisme. Di negara-negara dengan tingkat korupsi rendah seperti Finlandia, reformasi birokrasi telah berhasil menciptakan sistem administrasi yang bersih dan profesional.

Di Indonesia, reformasi birokrasi masih menjadi tantangan besar karena adanya resistensi terhadap perubahan dari dalam sistem itu sendiri. Oleh karena itu, perlu ada komitmen politik dari para pemimpin untuk mendukung perubahan tersebut serta melibatkan semua pihak terkait dalam proses reformasi ini. Hal ini termasuk melibatkan pegawai negeri sipil sebagai aktor utama dalam merancang kebijakan baru.

Salah satu aspek penting dari reformasi birokrasi adalah peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM). Pelatihan dan pengembangan karir bagi pegawai negeri sipil harus difokuskan pada peningkatan kompetensi serta nilai-nilai etika dalam pelayanan publik. Dengan SDM yang berkualitas tinggi, birokrasi akan mampu memberikan layanan terbaik kepada masyarakat tanpa terpengaruh oleh kepentingan pribadi. Evaluasi berkala terhadap kinerja birokrasi perlu dilakukan untuk memastikan bahwa reformasi berjalan sesuai rencana dan memberikan hasil yang diharapkan. Pemerintah harus siap menerima kritik konstruktif dari masyarakat terkait kinerja birokrasi agar terus melakukan perbaikan demi terciptanya pemerintahan yang bersih dan berintegritas.

f. Penguatan Lembaga Pengawas

Penguatan lembaga pengawas merupakan langkah strategis dalam meningkatkan akuntabilitas pejabat publik di Indonesia. Lembaga seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memiliki peran vital dalam melakukan pengawasan terhadap tindakan pejabat negara serta mencegah praktik korupsi sejak dini. Negara-negara dengan tingkat korupsi rendah biasanya memiliki lembaga pengawas independen yang kuat dan diberdayakan secara maksimal.

Di Indonesia, meskipun KPK telah menunjukkan keberhasilan dalam memberantas korupsi, tantangan tetap ada terkait otonomi lembaga ini serta ancaman-ancaman politik terhadap keberadaannya. Oleh karena itu, perlu ada dukungan legislasi agar lembaga pengawas dapat beroperasi tanpa intervensi politik atau tekanan dari pihak manapun.

Penguatan lembaga pengawas juga memerlukan peningkatan kapasitas sumber daya manusia di dalam lembaga tersebut agar mampu melakukan tugas-tugas pengawasan secara efektif dan efisien. Pelatihan khusus mengenai teknik investigatif serta pemahaman mendalam tentang hukum harus diberikan kepada para pegawai lembaga pengawas agar mereka dapat menjalankan tugas dengan baik. Kemudian, transparansi laporan hasil kerja lembaga pengawas kepada publik sangat penting untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap institusi tersebut. Dengan adanya laporan yang jelas mengenai tindakan-tindakan pengawasan serta hasil investigasinya, masyarakat akan merasa dilibatkan dan memiliki andil dalam menjaga integritas pemerintahan.

g. Penegakan Disiplin

Penegakan disiplin di kalangan pejabat publik adalah aspek krusial lainnya dalam meningkatkan etika pemerintahan di Indonesia. Disiplin kerja tidak hanya mencakup ketepatan waktu atau kepatuhan pada aturan administratif tetapi juga integritas moral saat menjalankan tugas-tugas pemerintahan sehari-hari. Negara-negara dengan tingkat korupsi rendah umumnya menerapkan sistem disiplin ketat sebagai bagian dari budaya organisasi mereka.

Di Indonesia, penegakan disiplin sering kali terhambat oleh budaya toleransi terhadap pelanggaran kecil maupun besar di kalangan aparatur negara. Oleh karena itu, perlu ada upaya konkret untuk menegakkan aturan disiplin secara konsisten tanpa pandang bulu agar semua pejabat merasa terikat pada norma-norma etikanya masing-masing.

Sistem reward and punishment dapat diterapkan sebagai salah satu cara untuk mendorong disiplin kerja di kalangan pejabat publik. Mereka yang menunjukkan kinerja baik serta mematuhi kode etik seharusnya mendapatkan penghargaan atau insentif tertentu sebagai motivator positif bagi pegawai lain untuk mengikuti jejak mereka. Sosialisasikan kode etik secara menyeluruh kepada semua lapisan birokrasi agar setiap individu memahami tanggung jawab moral mereka sebagai pelayan publik sekaligus konsekuensi jika melanggar aturan tersebut. Melalui penegakan disiplin yang tegas namun adil, diharapkan tercipta budaya kerja profesional di lingkungan pemerintahan Indonesia.

h. Penerapan Teknologi Informasi

Penerapan teknologi informasi (TI) merupakan salah satu solusi modern untuk meningkatkan efisiensi serta transparansi pemerintahan di Indonesia. Dengan memanfaatkan TI secara optimal, proses administrasi dapat dilakukan lebih cepat dan akurat sehingga mengurangi peluang terjadinya penyalahgunaan wewenang atau praktik korupsi lainnya. Negara-negara maju telah menunjukkan bahwa penggunaan sistem e-government mampu mempercepat layanan kepada masyarakat sekaligus meningkatkan akuntabilitas institusi pemerintah kepada rakyatnya.

Di Indonesia sendiri, sudah ada beberapa inisiatif e-government namun implementasinya masih belum merata di seluruh daerah. Penting bagi pemerintah pusat untuk mendukung daerah-daerah dalam penerapan TI melalui pelatihan serta penyediaan infrastruktur pendukung seperti internet cepat dan perangkat keras/software memadai agar semua lapisan birokrasi bisa mengakses teknologi terbaru demi kemudahan pelayanan publik. Oleh Karena itu perlunya perlindungan data pribadi menjadi perhatian utama saat menerapkan TI dalam administrasi pemerintahan agar informasi sensitif milik warga negara

tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu demi menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintah itu sendiri.

i. Kolaborasi Antar Lembaga

Kolaborasi antar lembaga pemerintah sangat penting guna menciptakan sinergi dalam upaya pemberantasan korupsi serta peningkatan etika pemerintahan di Indonesia. Berbagai lembaga seperti KPK, Ombudsman hingga Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) harus bekerja sama secara erat demi mencapai tujuan bersama yaitu mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel.

Dalam banyak kasus korupsi di Indonesia terjadi karena kurangnya komunikasi antar lembaga sehingga penanganannya tidak maksimal atau bahkan tumpang tindih antara satu instansi dengan lainnya; hal ini bisa dicegah melalui pembentukan forum-forum koordinatif antar lembaga terkait guna berbagi informasi serta pengalaman terbaik masing-masing instansi. Kolaboratif juga bisa diwujudkan melalui program-program bersama antara lembaga-lembaga tersebut guna mengedukasi masyarakat tentang bahaya korupsi serta cara-cara melaporkan jika menemukan indikasinya; pendekatan partisipatif semacam ini akan memperkuat posisi lembaga pengawas sekaligus membangun kepercayaan rakyat terhadap institusi negara tersebut. Kata kolaboratif antar lembaga bukan hanya sekadar formalitas semata tetapi harus diwujudkan melalui aksi nyata demi pencapaian tujuan bersama, hal ini tentunya membutuhkan komitmen tinggi dari para pemimpin masing-masing instansi agar kolaboratif dapat berjalan efektif sesuai harapan kita semua menuju Indonesia bersih dari praktik-praktik koruptif.

j. Pembentukan Mahkamah Etika Nasional

Pembentukan Mahkamah Etika Nasional merupakan langkah strategis lainnya guna menangani masalah kerapuhan etika penyelenggara negara di Indonesia; mahkamah ini bertujuan menegakkan kode etik bagi pejabat publik sekaligus memberikan sanksi tegas jika melanggarnya sehingga menambah rasa percaya diri rakyat terhadap institusi pemerintahannya sendiri. Dengan adanya Mahkamah Etika Nasional maka setiap tindakan tercela para penyelenggara negara bisa ditindaklanjuti secara independen tanpa campur tangan politik, hal ini tentunya sangat dibutuhkan mengingat banyak kasus pelanggaran kode etik selama ini tidak mendapatkan perhatian serius akibat intervensi pihak tertentu.

Mahkamah Etika Nasional juga bisa berfungsi sebagai wadah edukatif bagi seluruh aparatur negara terkait nilai-nilai moral serta kode etik profesi, melalui seminar-seminar ataupun workshop rutin maka para pejabat akan semakin paham betapa pentingnya menjaga integritas saat menjalankan tugas-tugas mereka demi kepentingan bangsa. Mahkamah Etika Nasional adalah salah satu solusi jitu menghadapi tantangan besar terkait kerapuhan etika penyelenggara negara, semoga langkah ini bisa segera direalisasikan agar tercipta sistem pemerintahan bersih bebas dari praktik-praktik koruptif

KESIMPULAN

Hasil dari penelitian ini mengindikasikan bahwa membandingkan etika pemerintahan di negara-negara yang memiliki tingkat korupsi rendah dapat memberikan pelajaran yang sangat berharga bagi Indonesia dalam usaha mengatasi masalah korupsi. Negara-negara seperti Denmark, Singapura, Swedia, dan Norwegia telah berhasil menerapkan prinsip-prinsip etika yang kuat, termasuk transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat.

Praktik-praktik ini tidak hanya berkontribusi pada penurunan angka korupsi tetapi juga memperkuat kepercayaan publik terhadap pemerintah. Di sisi lain, Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan dalam menerapkan etika pemerintahan yang baik, seperti kurangnya transparansi dan akuntabilitas. Oleh karena itu, Indonesia perlu mengadopsi langkah-langkah strategis yang telah terbukti efektif di negara-negara tersebut untuk memperbaiki sistem tata kelola dan menurunkan tingkat korupsi.

Kemudian untuk penelitian selanjutnya, disarankan agar fokus diarahkan pada pengembangan model implementasi etika pemerintahan yang dapat disesuaikan dengan konteks lokal di Indonesia. Penelitian selanjutnya bisa mengeksplorasi lebih dalam mengenai faktor-faktor budaya dan sosial yang memengaruhi penerapan etika di Indonesia serta melakukan studi kasus pada daerah-daerah yang berhasil menerapkan praktik etika yang baik. Selain itu, penting untuk melibatkan masyarakat dalam proses pengawasan dan penegakan hukum guna menciptakan lingkungan yang mendukung integritas pemerintahan. Dengan pendekatan yang menyeluruh dan berdasarkan praktik terbaik dari negara lain, diharapkan penelitian mendatang dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA:

- [1] Afrijal, A., Helmi, H., Latif, I. R., & Usman, B. (2023). Penguatan Etika Pemerintahan Sebagai Upaya Meningkatkan Kinerja Aparatur Pemerintahan. *Jurnal Pemerintahan Dan Politik*, 8(4), 269-275.
- [2] Arti, N. D. B., & Rizky, R. Y. (2023). Analisis Korupsi dan Upaya Mewujudkan Good Governance Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Administrasi Pemerintahan Daerah*, 15(2), 135-149.
- [3] Hayani, F., Oktavia, I., Oktavia, R., Fania, S. A., Hanoselina, Y., & Helmi, R. F. (2024). Analisis Permasalahan Etika Pejabat Pemerintahan Dari Perspektif Administrasi Publik. *Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara*, 2(4), 259-268.
- [4] Indriasari, R. Lecture Note Filsafat dan Etika Pemerintahan 32A1.
- [5] Mulyani, T., Siagian, F. S., Putra, N., & Imam, M. K. (2024). PENGUATAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI DENGAN MENJADIKANNYA LEMBAGA EKSAMINATIF STUDI KOMPARATIF DI DENMARK DAN FINLANDIA. *Grondwet*, 3(2), 44-71.
- [6] NUGROHO, M. (2023). *Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Korupsi di Indonesia: Analisis Perbandingan dari Perspektif Hukum dan Etika* (Doctoral dissertation, Universitas Terbuka).
- [7] Paisa, L., Gosal, R., & Monintja, D. (2019). Etika pemerinthan dalam meningkatkan kinerja aparatur sipil negara. *Jurnal Eksekutif*, 3(3).
- [8] Siagian, F. S., Lubis, A. H., Salwa, N. A., & Firouzfard, S. (2024). Kebijakan Pemberantasan Korupsi Berbasis Keadilan: Perbandingan Antara Indonesia Dan Denmark. *Integritas: Jurnal Antikorupsi*, 10, 29-52.